SEGALANYA TENTANG AMDK

DEFEND ZINE #1

PROLOG

Di negara yang dikeliling air, minum justru menjadi urusan dompet. Bukan karena tidak ada air, melainkan negara tidak hadir dalam gelas kita. Kita hidup dalam ironi yang ternormalisasi. Sekedar untuk minum, kita harus membeli, membeli hak paling dasar untuk hidup!

Zine ini lahir dari kegelisahan sederhana tentang! Mengapa minum air berarti membuka botol? Mengapa keselamatan paling dasar yaitu air bersih, harus dibayar berulang kali?

Zine ini tidak menawarkan solusi. Ia mengajukan pertanyaan yang sengaja dibuat tidak nyaman. Tentang air, tentang kuasa, dan tentang kebijakan yang memilih membiarkan daripada memperbaiki. Tentang kegagalan struktural yang terasa sangat personal. Haus yang harus dibayar!

★★★

Hak cipta bebas dan merdeka. Setiap makhluk dianjurkan dan dinasehatkan untuk mengkopi, mencetak, menggandakan, menyebar isi serta materi-materi di dalamnya.

ALIRAN DANA SIAP MINUM

Negara mengubah kebutuhan paling dasar manusia, air minum menjadi pasar raksasa yang memiliki kepentingan untuk tetap normal dalam ketidakberesan. Air keran yang tidak bisa diminum bukan karena pipa rumah terlalu tua untuk mengalirkan air bersih, namun itu semua berakar dari gejala politik pada industri yang amat kotor. Dan uang selalu memiliki jalan untuk mempengaruhi kebijakan.

Pada tahap ini, negara telah sukses menjadi sales berprestasi dalam menciptakan industri bernama Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). 7 dari 10 rumah tangga mengonsumsi air minum yang terkontaminasi E. coli (bakteri yang menyebabkan diare) [1]. Selain itu, akses air layak minum di Indonesia hanya 11,9%. Ini yang menyebabkan kenapa air keran kita tidak layak untuk langsung diminum [1].

Dampak dari kelalaian penyediaan air layak minum ini menyebabkan warga terpaksa membeli air minum setiap hari. Sebanyak 40,64% rumah tangga menjadikan air kemasan bermerek atau air isi ulang sebagai sumber utama air minum [2]. Ini angka yang sangat brutal, bukan karena masyarakat tiba-tiba menjadi konsumen loyal dari industri air kemasan, namun karena air layak minum telah bergeser dari fasilitas publik menjadi komoditas rutin.

---

[1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "7 dari 10 Rumah Tangga Indonesia Konsumsi Air Minum yang Terkontaminasi," Apr. 1, 2021.
[2] N. Muhamad, "Mayoritas Rumah Tangga Indonesia Konsumsi Air Minum Kemasan," Databoks Katadata, Oct. 27, 2023.

Di level global, gambarannya semakin telanjang. Pada 2024 hanya sekitar 30% penduduk Indonesia yang mendapatkan layanan air layak minum [3]. Sebagai perbandingan, 30% penduduk Indonesia adalah setengah pulau jawa, tidak termasuk sumatera, kalimantan, dan pulau-pulau lainnya.

Lebih beringas lagi, biaya politik kita mahal. Dan politik selalu mencari sponsor. Biaya Pilkada mencapai lebih dari Rp10 Miliyar, Bupati/Wali Kota rata-rata Rp30 Miliyar, sedangkan gubernur bisa mencapai Rp100 Miliyar [4]. Dengan membaca data tersebut, tentu kita tidak perlu kaget bahwa klaim pejabat demi kepentingan umum adalah dongeng yang dininabobokan publik. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan pundi-pundi modal hanyalah melalui sponsor.

Tidak berhenti di mahal, mekanisme utang politik yang berasal dari sponsor ternyata tidak gratis. Para sponsor tentu mengharapkan balas budi yang kemudian menciptakan kebijakan pro sponsor. Dimana pola pendanaan donatur hanya didominasi oleh pengusaha. Pilkada 2018 misalnya, donatur pengusaha berasal dari keluarga (38,1%) dan dari luar keluarga (40,9%) [4]. Maka dengan ini sebaiknya kita mengetahui, produk kebijakan seperti apa yang akan dihasilkan dari modal-modal seperti ini.

Ketika ongkos oksigen politik telah tercukupi, maka langkah selanjutnya adalah balas budi untuk membayar hutang. Dalam konteks politik, membayar hutang tidak selalu tentang mengembalikan modal, ia dapat berupa kebijakan yang membiarkan air pipa hanya cukup untuk mandi dan masak. Kebijakan tidak akan pernah didorong untuk melewati batas air layak konsumsi sampai ke keran-keran rumah kita. Status quo ini sangatlah menguntungkan. Warga tetap membeli air minum, pemerintah tidak menanggung resiko biaya reformasi, dan pasar tetap tetap tumbuh. Tentu sangat menguntungkan jika kita menggunakan logika mereka, bukan?

---

[3] UN-Water (SDG 6 Data Portal), "SDG 6 Snapshot in Indonesia," 2024.
[4] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Biaya dan Mahar Politik Memicu Korupsi," Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Sep. 4, 2023.

Lalu kenapa industri air mineral relevan dalam politik biaya tinggi? Karena ini bukan usaha kecil yang bisa diabaikan. Tahun 2025 industri AMDK memiliki 707 pabrik dengan kapasitas total 47 miliar liter per tahun, menyerap 46.000 tenaga kerja langsung dengan utilisasi (kapasitas terpasang) lebih dari 70% selama lima tahun terakhir, serta 1.348 sertifikasi SNI aktif [5]. Ini industri yang sangat besar, tersebar, berjejaring, berasosiasi, dan memiliki kepentingan kebijakan yang konkret mulai dari izin sumber air baku, standar mutu air, pengawasan penggunaan air, sampai urusan kemasan plastik yang menyebabkan timbulan sampah.

Dan kritik tajamnya ialah, air keran yang tak layak minum menyebabkan warga wajib membeli yang kemudian melahirkan industri dengan daya tawar tinggi dalam menuntun kebijakan agar kewajiban ini tidak pernah hilang. Bahkan dengan dampak lingkungan yang begitu jelas, industri ini tetap bertahan. Timbulan sampah nasional 2023 berjumlah 56,63 juta ton, dan baru 39,01% dikelola layak; plastik sekitar 10,8 juta ton (hampir 20%), dengan tingkat daur ulang nasional baru 22% [6]. Sebagai gambaran, 56,63 juta ton sampah ini sama dengan besarnya pulau bali dengan selimut setebal 2 cm. Luar biasa bukan? Sayangnya di pulau tersebut kita tidak akan pernah melihat turis berwisata melainkan ikan yang terlilit botol bekas di kepalanya.

Melihat fenomenanya ini, kita hanya cukup mencari tau siapa pejabat yang mengusung program untuk perbaikan air keran layak minum dapat merubah lanskap kita dalam memandang lingkungan, politik, pendidikan, dan tenaga kerja. Karena memang semasif itu kerusakan yang ditimbulkan dari ketidakmampuan negara dalam menyediakan air keran layak minum sebagai fasilitas publik.

---

[5] ANTARA News, "Menperin: AMDK jadi pilar industri pengolahan RI," Nov. 12, 2025.
[6] Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), "KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025 (Siaran Pers No. SR.123/HUMAS/KLH-BPLH/6/2025)," Jun. 22, 2025.

★★★

DOPAMIN BOTOLAN: SUARA "KLIK" TUTUP PLASTIK YANG MENIDURKAN LOGIKA

Ketakutan kita pada air keran itu sebenarnya bukan cuma soal kebersihan, tapi semacam learned helplessness—ketidakberdayaan yang kita pelajari bareng-bareng selama puluhan tahun. Secara psikologis, kita seperti sudah "dicuci otak" untuk merasa terancam oleh apa pun yang mengalir dari pipa rumah sendiri, lalu pelariannya adalah ketergantungan akut pada rasa aman semu di dalam botol plastik. Kondisi ini makin parah gara-gara iklan yang pakai taktik fear-based marketing, yang hobi membisikkan kalau bahaya selalu mengintai di balik air bening yang nggak punya sertifikat resmi. Lucunya, kita cemas bukan karena airnya pasti beracun, tapi karena kita sudah kehilangan kontrol dan nggak percaya lagi pada jaminan kualitas dari negara.

Kalau dibedah lewat psikologi kognitif, kebiasaan beli air botolan itu sebenarnya mekanisme pertahanan diri biar kita nggak merasa bersalah (disonansi kognitif) saat melihat lingkungan yang makin kotor. Kita sering melakukan greenwashing mental; merasa sudah hidup sehat karena minum air "murni", padahal alam bawah sadar kita tahu kalau kita cuma nambahin tumpukan sampah plastik. Kecemasan ini baru bisa reda pas kita dengar bunyi "klik" saat buka tutup botol—suara yang memicu dopamin dan rasa aman palsu di kepala.

Kita rela bayar mahal buat ketenangan pikiran sesaat, yang sebenarnya cuma cara untuk menutupi ketakutan eksistensial kita tentang ekosistem yang perlahan hancur.

Kecemasan ini sengaja dipelihara supaya roda bisnis tetap berputar kencang di atas rasa takut kita terhadap kuman. Industri itu nggak jualan air; mereka jualan "kepastian" di tengah amburadulnya layanan publik kita. Tekanan psikologis ini jahat sekali, sampai-sampai kita merasa jadi orang tua yang buruk kalau nggak kasih air bermerek buat keluarga, seolah kasih sayang sekarang harus diukur lewat parameter laboratorium. Kita berubah jadi masyarakat paranoid yang menganggap air dari tanah sebagai musuh yang harus "ditaklukkan", disaring ketat, dan dipenjara dalam plastik sebelum boleh menyentuh lidah.

Fenomena ini menunjukkan betapa hancurnya social trust atau kepercayaan kita pada sistem yang seharusnya melindungi kepentingan orang banyak. Ketika kepercayaan kita pada negara runtuh, kecemasan individu naik, dan kita terpaksa cari solusi sendiri-sendiri yang sifatnya sangat egois. Rasa aman yang harusnya jadi hak dasar, sekarang dikomodifikasi secara kejam; kita merasa tenang secara pribadi, tapi secara kolektif kita sebenarnya sedang mengalami serangan panik massal. Kita cemas soal masa depan air bersih, tapi solusinya malah makin merusak sumber air itu sendiri—sebuah lingkaran setan yang sempurna.

Ketakutan akan air yang "nggak jelas" ini juga bikin kita jadi konsumen kompulsif

yang gila belanja filter air atau perangkat pemurni mahal. Semakin kita cemas, semakin banyak teknologi yang kita beli, padahal produksi alat-alat itu sendiri justru ikut andil merusak lingkungan sumber air asli kita. Rasa takut dan rasa haus adalah bahan bakar ekonomi yang nggak bakal kena resesi, kombinasi pasar yang abadi. Kita ini ibarat pasien yang dengan senang hati beli "obat" botolan dari pihak yang sebenarnya ikut meracuni lingkungan tempat tinggal kita sendiri.

Sekarang, kesehatan mental kita seolah-olah cuma digantungkan pada sisa stok galon di pojok dapur. Kita sudah berubah jadi spesies yang gelisah kalau nggak pegang plastik, sebuah kelainan psikologis yang anehnya dianggap normal di zaman sekarang. Kehilangan air botolan bisa bikin kita panik luar biasa, lebih nyata daripada rasa sedih kita melihat sungai-sungai yang sudah mati dan kering. Mari kita jujur saja, kecemasan ini adalah bentuk kegilaan yang terorganisir, di mana kita lebih percaya pada label harga daripada kejujuran alam yang selama ini memberi kita hidup.

★★★

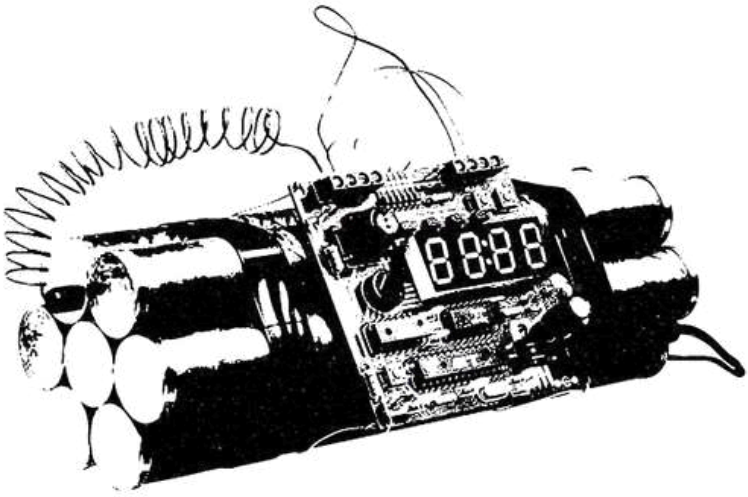

MEMBOTOLKAN TUHAN: KOMODIFIKASI TAKDIR CAIR

Di kaki gunung yang hijau dan tampak lugu dari kejauhan, saya pernah melihat pipa-pipa baja mengular pelan, menembus tanah yang dulu basah oleh mata air. Warga desa menyebutnya “proyek”, seolah kata itu cukup netral untuk menutupi kenyataan bahwa sejak pengeboran dimulai, debit air di beberapa sumur rumah mereka tak pernah kembali sama. Air tanah yang dulunya berkah komunal—cukup untuk sawah, ternak, dan kebutuhan harian—kini dipaksa menyerah pada ekstraksi besar-besaran yang, ironisnya, sering disebut sebagai “pengelolaan berkelanjutan”.

Air yang dulu mengalir bebas untuk petani, sekarang disedot masuk ke tangki penampungan raksasa, menunggu nasibnya diubah menjadi angka-angka di laporan laba rugi. Di pabrik, air baku itu kehilangan identitas alaminya melalui filtrasi ganda dan ozonisasi. Kita menyebutnya pemurnian, padahal ini juga bisa dibaca sebagai proses penyeragaman: pengusiran mineral liar yang tak sesuai dengan selera pasar massal. Air harus terasa “aman”, “netral”, dan—yang terpenting—mudah dijual.

Tahap berikutnya bahkan lebih ironis. Air dipaksa melewati membran "Reverse Osmosis" yang begitu ketat, menyaring hampir segalanya hingga tersisa cairan yang luar biasa bersih, nyaris tanpa karakter. Setelah itu, teknisi menambahkan kembali magnesium dan potasium secara sintetis agar air tersebut terasa "segar" menurut standar industri. Sebuah lingkaran absurd: mineral alami dibuang, lalu dibeli kembali dalam bentuk buatan. Pada saat yang sama, butiran plastik resin dipanaskan, ditekan, dan ditiup menjadi botol PET yang mengkilap—proses yang, menurut berbagai laporan, menghabiskan air lebih banyak daripada isi botol yang nantinya kita minum dalam hitungan menit.

Ketika air dan plastik akhirnya bertemu di ruang pengisian steril, terjadilah semacam pernikahan paksa yang akan bertahan jauh lebih lama daripada umur manusia—di tempat pembuangan akhir. Air tersebut kini resmi menjadi Air Minum Dalam Kemasan, lengkap dengan label BPOM dan SNI yang memberi rasa aman instan. Kita membayar ribuan kali lipat harga air tanah demi segel plastik dan janji kesehatan yang jarang kita pertanyakan. Padahal produksi botol plastik global membutuhkan jutaan barel minyak setiap tahun dan menyumbang emisi karbon yang ikut memanaskan planet ini. Air yang seharusnya mendinginkan dahaga kita justru lahir dari proses yang secara perlahan membakar rumah kita sendiri.

Ironisnya, saya menulis ini sambil duduk di kota, dengan sebotol air di meja—botol yang kemungkinan besar akan saya buang beberapa menit setelah isinya habis. Di sinilah kemunafikan itu terasa paling nyata. Dengan satu putaran tutup botol, kita membebaskan air dari siklus industri yang panjang, hanya untuk meninggalkan plastiknya sebagai limbah yang akan bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Perusahaan terus berlomba meningkatkan produksi, sementara tanggung jawab pengelolaan limbah dan dampak sosial sering berhenti di slogan keberlanjutan.

Setiap tegukan air botolan sebenarnya mengandung jejak karbon, eksploitasi lingkungan, dan kompromi moral yang jarang kita akui. Mungkin inilah bentuk kemajuan yang kita pilih: praktis, steril, dan mahal—bukan hanya untuk dompet, tetapi juga untuk masa depan yang harus kita beli kembali dari kerusakan yang kita ciptakan sendiri.

Aulia Adinda Fitriani. (2024). Eksploitasi Air Tanah oleh AMDK: Studi Kasus Sosio-Ekologis Pengeringan Mata Air di Desa-Desa Indonesia

Kurniawan. (2020). Dampak Eksploitasi Air Tanah Oleh Perusahaan Air Mineral Terhadap Penurunan Suplai Air Pertanian Di Kecamatan Madapangga

Merlin Salerno. (2024). How many liters of water does it take to make a plastic bottle?

★★★

APARTHEID AIR: DINDING TEBAL YANG MEMISAHKAN SI KAYA DAN SI HAUS

Layanan publik yang hancur itu sebenarnya bukan cuma soal teknis, tapi diskriminasi sistemik yang menciptakan "pajak tak resmi" buat kelas pekerja. Di Indonesia tahun 2025 ini, kegagalan pipa negara menjangkau kampung-kampung kota justru memaksa si miskin membayar harga air yang jauh lebih mahal per liternya dibanding penghuni apartemen mewah. Bayangkan, mereka yang upahnya pas-pasan harus rela menyisihkan 10-15% pendapatan cuma buat beli air jerigen eceran. Ini semacam perampokan legal; negara pilih absen dan membiarkan pasar bebas memangsa kebutuhan paling dasar rakyatnya sendiri.

Buat warga di gang sempit, air bukan cuma benda cair, tapi beban fisik yang menguras tenaga dan waktu tiap harinya. Mereka harus memikul jerigen berat, mengantre di hidran, sampai begadang cuma demi menunggu pipa yang lebih sering "batuk" daripada mengalir lancar.

Di sini, air berubah jadi hukuman fisik bagi mereka yang nggak punya modal buat narik pipa langsung ke dalam rumah.

Sementara itu, di balik pagar tinggi real estat, si kaya bisa menikmati air tanpa perlu pusing memikirkan asalnya. Berbekal kekuatan modal, mereka tinggal pasang filter tercanggih dan pompa paling kuat, atau tinggal telepon stok air mineral premium kalau butuh. Mereka sama sekali nggak tersentuh oleh berantakannya layanan publik yang sedang mencekik kehidupan di seberang tembok mereka. Bagi kelas atas, air itu cuma tagihan kecil di antara daftar belanjaan, bukan masalah hidup-mati yang menentukan nasib hari esok.

Jurang kelas ini memperlihatkan betapa kejamnya air saat dijadikan alat pemisah sosial dalam sistem kapitalistik. Privatisasi air terbukti cuma memperlebar ketimpangan karena fokusnya cuma cari cuan, bukan memenuhi hak asasi manusia. Begitu air jadi komoditas, hak untuk hidup sehat otomatis cuma jadi milik mereka yang mampu bayar "uang jaminan" ke perusahaan. Rakyat kecil akhirnya terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang diperparah oleh biaya

hidup dasar yang harusnya ditanggung negara secara cuma-cuma.

Hal paling getir adalah melihat orang miskin harus kerja lebih keras demi air yang kualitasnya pun sering kali nggak jelas. Mereka membayar "pajak fisik" dengan risiko kesehatan karena terpaksa pakai air tercemar, sementara pilihan lain nggak ada. Di sisi lain, si kaya bisa santai berceramah soal sustainability sambil berendam di bathtub penuh air yang disedot dari tanah yang sama. Ketimpangan ini adalah bukti nyata kalau dalam sistem yang rusak, air mata si miskin harganya jauh lebih mahal dibanding air mandi si kaya.

Situasi ini menciptakan semacam "apartheid air", di mana hak untuk hidup dibatasi oleh tebal-tipisnya dompet kita di pasar gelap kebutuhan dasar. Pemerintah yang lamban membenahi pipa secara nggak langsung malah memberi subsidi keuntungan buat pengusaha air kemasan. Pajak tak resmi ini terus menggerus daya beli masyarakat bawah, bikin mereka susah naik kelas karena uangnya habis cuma buat menyambung nyawa. Air yang harusnya menyatukan kehidupan, malah jadi tembok tinggi yang memisahkan antara penguasa dan mereka yang terpinggirkan.

Oleh karena itu, kalau selama air masih dianggap barang dagangan, keadilan sosial itu cuma mitos yang tertulis di kertas usang konstitusi. Perjuangan dapet air adalah perjuangan kelas yang paling nyata, terjadi tiap hari di gang-gang becek dan pemukiman kumuh yang sering dilupakan. Kita nggak bisa pamer soal kemajuan bangsa kalau buat minum saja, seorang buruh harus mengorbankan waktu istirahat dan separuh upahnya. Sudah saatnya kita berhenti mendewakan botol plastik dan mulai menuntut kedaulatan air sebagai hak kolektif yang nggak boleh dirampas para elite.

★★★

KENYAMANAN PRIBADI, BIAYA BERSAMA

Air kemasan adalah beban publik yang dibungkus kenyamanan pribadi. Indonesia menghasilkan 56 juta ton sampah pada tahun 2023 dan 10 juta tonnya (sekitar 20%) adalah sampah plastik [1]. Jika dibayangkan 10 juta ton sampah plastik, maka setara sepertiga luas wilayah DKI Jakarta.

Dengan jumlah sampah yang layak dikelola hanya 39%, itu berarti masih banyak sampah yang terbengkalai dan berada di TPA menyebabkan pencemaran lingkungan. Bagaimana bisa sampah di TPA dapat menyebabkan pencemaran? Karena sampah bukan benda mati yang berhenti ditumpukan. Dengan sistem TPA timbunan terbuka (open dumping), sampah berubah menjadi polutan aktif yang menyebar lewat air, tanah, dan udara. Diperparah plastik memiliki masa daur 100 tahunan, menyebabkan partikel dapat menyebar dan nyaris permanen.

---

[1] Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), "KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025 (Siaran Pers No. SR.123/HUMAS/KLH-BPLH/6/2025)," Jun. 22, 2025.

Apa yang terjadi jika pencemaran lingkungan ini menyentuh perairan? Mari kita menelisik ke air Telaga Jolotundo (Mojokerto)! Kandungan padatan terlarut pada air Telaga Jolotundo adalah 67 TDS (satuan padatan terlarut). Sebagai perbandingan, Aqua memiliki 170 TDS. Tentu lebih bagus kualitas air di Telaga Jolotundo karena semakin kecil jumlah TDS, maka semakin layak untuk dikonsumsi. Namun kualitas tersebut tidak bertahan hingga muara sungai. Karena pada muara sungai, angka tersebut berubah menjadi 1.000 TDS [2]. Ini semua terjadi karena pencemaran lingkungan. Tentu bukan hanya disebabkan oleh sampah, limbah industri juga berperan dalam mempengaruhi kualitas tersebut selama air-air ini menuju muara.

Selain itu, terdapat pencemaran lingkungan yang lebih licik yaitu mikroplastik. Mikroplastik saat ini telah banyak ditemukan dalam air minum keran dan air minum kemasan. Bahkan dalam sebuah studi disebutkan terdapat satu liter air kemasan yang ditemukan 240.000 partikel mikroplastik [3]. Itu setara dengan satu koin logam yang dilarutkan dalam dua kolam renang standar olimpiade. Karena ukurannya yang mikroskopis, partikel ini dapat menembus hingga bagian terdalam tubuh dan berisiko 4,5 kali lebih tinggi terkena serangan jantung, stroke, hingga kematian [4].

Resiko kesehatan ini tidak hanya bocor di sungai, namun juga ke hulu. Air kemasan sekali pakai mengonsumsi 11-31 kali lebih banyak energi dibandingkan sistem keran. Ironisnya, lebih dari 70% total energi listrik fosil/terbarukan dihabiskan oleh sistem air kemasan hanya untuk membuat botolnya, bukan untuk airnya, bukan untuk memompa, dan sering kali lebih besar daripada energi distribusi [5]. Jadi ketika kita mendapati truk mengangkut air kemasan, maka itu sama dengan melihat botol plastik yang dibungkus truk memuat botol plastik lainnya.

---

[2] F. Gaban, D. Laksono, Y. Priambodo, and B. Harobu, #Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru. Indonesia: Patjar Merah, Sep. 2025, ISBN: 978-979-775-347-4.
[3] A. P. News, “Study finds nanoplastics in bottled water,” Jan. 8, 2024.
[4] R. Marfella et al., "Microplastics and Nanoplastics in Atheromatous Plaque," N. Engl. J. Med., vol. 390, no. 10, pp. 900–910, Mar. 2024, doi: 10.1056/NEJMoa2309822.
[5] Center for Sustainable Systems, University of Michigan, “Energy Implications of Bottled Water,” Report No. CSS09-10, 2009.

Jadi, air kemasan ini merupakan paradoks yang memalukan. Kita membeli kebersihan pribadi, namun disisi lain kita menciptakan pencemaran yang mengotori bersama. Di satu sisi, kita ingin air aman, di sisi lain kita ikut memperkuat arus plastik yang membuat sungai, tanah, dan bahkan rantai air minum dipenuhi partikel dan residu. Dengan timbulan sampah plastik nasional yang besar, tingkat daur ulang yang rendah, dan pengelolaan yang belum memadai, air kemasan dalam skala massal bukan lagi pilihan netral. Ia adalah pendorong struktural pencemaran!

★★★

HIKAYAT PIPA TUA: WARISAN BURUK DI BAWAH ASPAL

Kalau kita main ke Swiss atau Jepang, air keran itu simbol harga diri publik—sesuatu yang bisa diteguk langsung tanpa rasa was-was. Tapi di Indonesia, air keran lebih mirip teka-teki laboratorium yang penuh misteri. Di sana, infrastruktur dibangun dengan prinsip public service obligation yang saklek; negara menjamin air sampai ke ujung pipa rumah warga dengan kualitas prima.

Kontras sekali dengan negeri kita tercinta, di mana pipa-pipa tua yang bocor di bawah aspal justru jadi pintu masuk bagi bakteri E. coli dan kontaminan tanah. Data tahun 2025 bahkan menunjukkan tingkat kebocoran air di kota besar kita masih di atas 40 persen.

Akhirnya, air dari perusahaan penyedia cuma berakhir jadi cairan multifungsi

buat cuci motor atau siram tanaman, bukan buat menghidupi sel tubuh kita. Kita pun dipaksa melakukan "ritual memasak" yang melelahkan atau menyerah pada pelukan galon plastik bermerek yang rajin menagih biaya langganan tiap bulan.

Ketimpangan ini menciptakan sebuah satire global: warga London merasa berdosa kalau beli air kemasan, sementara warga Jakarta merasa seperti sedang uji nyali kalau meminum air keran. Di negara Barat, kebijakan pengurangan plastik sudah sampai tahap di mana restoran wajib menyediakan air keran gratis sebagai hak dasar. Sementara di sini, minta air minum cuma-cuma di kafe sering dianggap nggak sopan atau bikin malu gengsi kelas menengah kita.

Kita sudah terkondisikan secara sistemik buat percaya kalau "air aman itu harus punya segel plastik," sebuah narasi yang jelas sangat menguntungkan para pemegang saham industri AMDK. Padahal, kalau mau jujur, biaya pengolahan air kolektif oleh negara jauh lebih murah daripada jutaan rumah tangga harus beli sendiri-sendiri secara eceran. Masalahnya bukan lagi soal teknologi, tapi soal kemauan politik untuk berhenti menjadikan air sebagai ladang bisnis yang "basah" dan menggiurkan.

Menjamurnya depot air minum isi ulang di pinggir jalan sebenarnya adalah

bentuk pemberontakan rakyat terhadap mahalnya harga air bermerek. Depot-depot ini jadi pelarian ekonomi bagi kelas pekerja, meski standar higienitasnya sering jadi perdebatan sengit di jurnal-jurnal kesehatan publik. Di luar negeri, peran depot ini sudah lama digantikan oleh ribuan water fountain di ruang publik yang terawat dan gratis untuk siapa saja. Sedangkan di Indonesia, ruang publik kita lebih banyak dihiasi tumpukan sampah botol plastik daripada fasilitas air minum cuma-cuma.

Perbedaan ini mencerminkan bagaimana konsep "barang publik" pelan-pelan bergeser jadi "barang privat" dalam kamus ekonomi kita yang makin liberal. Kita sepertinya lebih bangga membangun mal megah daripada memastikan seorang pengemis bisa dapat segelas air bersih tanpa harus mengorek uang logam terakhirnya.

Ironi ini makin terasa saat turis asing kena Bali Belly cuma karena pencernaan mereka kaget menghadapi "kreativitas" mikroba dalam air keran kita. Ini bukti telak kalau kualitas air adalah cermin peradaban; makin maju sebuah negara, makin sedikit plastik yang mereka butuhkan cuma buat hilangkan dahaga.

Di sana, mereka punya trust yang tinggi pada pemerintahnya, sementara kita punya trust issue kronis terhadap pipa air sendiri. Celah ini kemudian dikapitalisasi dengan cantik oleh perusahaan global yang menjual air yang sama, tapi dengan cara jualan yang beda total. Di Eropa mereka jualan botol ramah lingkungan, tapi di sini mereka jualan "kesehatan" seolah air lain itu racun mematikan. Kita pun terjebak dalam delusi kalau kemajuan itu artinya bisa beli air botolan yang harganya lebih mahal dari seliter bensin.

Akhirnya, kita harus berani jujur bahwa membandingkan air di Indonesia dengan luar negeri adalah membandingkan hak asasi dengan barang dagangan yang timpang. Selama akses air bersih belum dianggap sepenting membangun jalan tol, kita akan terus jadi pasar empuk bagi limbah plastik dunia. Perjalanan air kita adalah cerita tentang kegagalan kolektif dalam menjaga kedaulatan sumber daya yang paling mendasar bagi hidup.

Setiap kali kita melihat air keran bening di luar negeri, ingatlah itu hasil perjuangan panjang warganya menuntut hak. Sementara di sini, kita masih sibuk berdebat soal merek air mana yang paling sedikit mikroplastiknya, sambil tetap membuang botolnya ke sungai yang sama. Masa depan kita tergantung pada seberapa berani kita menggugat sistem yang memaksa kita membeli apa yang seharusnya diberikan bumi secara cuma-cuma.

Laporan NRW 2025: Krisis Air Bersih 2025: Tantangan Pengelolaan Sungai dan Bendungan (Kompasiana, Desember 2025).
Studi Bali Belly: SIBATIK Journal Vol. 4 No. 8 (2025) Mengenai Dampak Kesehatan Wisatawan di Bali.
Analisis Privatisasi: Komparasi Politik Privatisasi Air Inggris dan Indonesia (Kajian Administrasi Publik).
Data Pencemaran: Siaran Pers UNICEF Indonesia tentang Pencemaran Air Rumah Tangga.

★★★

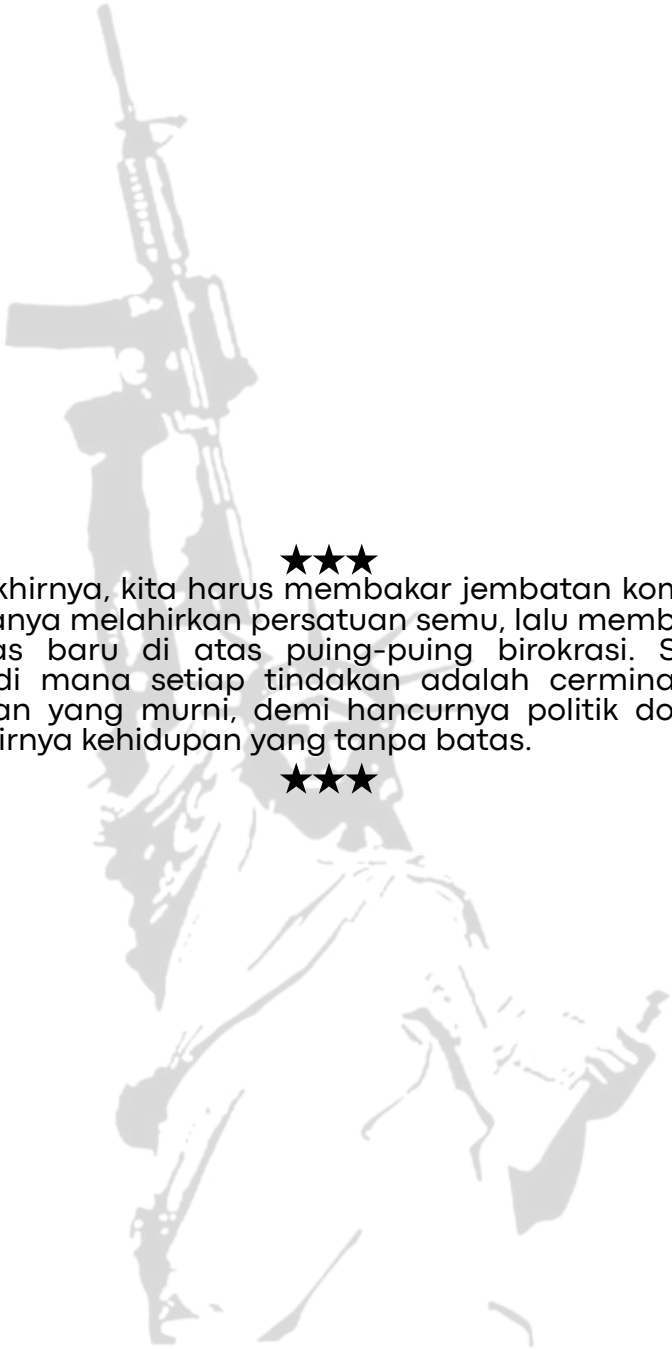

★★★

Pada akhirnya, kita harus membakar jembatan kompromi yang hanya melahirkan persatuan semu, lalu membangun sosialitas baru di atas puing-puing birokrasi. Sebuah ruang di mana setiap tindakan adalah cerminan dari keinginan yang murni, demi hancurnya politik dominasi dan lahirnya kehidupan yang tanpa batas.

★★★